

ABSTRACT**Analysis a Failure of Paired Widya Kandi and Moh Hilmi in Elections Regent Kendal 2015****Arvyn Galang Prakasa
Nim. 14010110120083**

Elections are a way in a country that adheres to the election for public officials. The elections or the election in Indonesia is a general election to elect the regional head and deputy head of the region directly by local residents who qualify. On December 9, 2015 local elections held simultaneously for the first time, including Kendal. In the elections is certain there will be candidates who won and the defeated pair. The focus of this study is to discuss about the failure of incumbent Widya Kandi with a pair deputy candidates Moh Hilmi. The method used in this research is Qualitative. Research sites in Kendal regency. The method of collecting the data in this study by interviewing informants involved in Kendal 2015 election.

Results from the study showed some factors failure of incumbent Widya Kandi. (1) The role of political parties in the process of winning was less effective. (2) Performance Widya Kandi incumbent in office less well, especially the issues of infrastructure development that is less realized, making communities Moh Hilmi figures disappointed and very new in world politics make less known by the public. (3) The strategy used by less than the maximum campaign team made no significant noise increase. (4) Wdya Kandi attacked by a black campaign issues that make her electability down.

Key words: Election, Failure, Analysis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca Reformasi pada tahun 1998, Indonesia memasuki babak baru sebagai negara demokrasi salah satu ciri utama negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya. Ada dua kategori pemilihan umum di Indonesia, yakni pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif. Pemilihan eksekutif merupakan serangkaian kegiatan untuk memilih pimpinan negara atau presiden dan memilih gubernur dan bupati atau walikota di tingkat daerah. Sedangkan pemilu legislatif merupakan kegiatan untuk memilih anggota parlemen baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Setiap warga negara yang memenuhi syarat, berhak berpartisipasi dalam pemilihan tersebut, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih.

Dasar hukum untuk Pilkada atau yang disebut juga dengan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Umum 2014 memulai babak baru sistem perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia. Dengan perolehan suara sebanyak 18,95% atau sekitar 23.681.471 suara telah menjadikan PDIP sebagai partai penguasa di ranah legislatif. Tidak hanya itu saja, PDIP bersama koalisinya juga berhasil mengusung Joko Widodo menjadi presiden Indonesia periode 2014-2019. Pada tanggal 9 Desember 2015 lalu Indonesia melaksanakan Pilkada serentak pertama kalinya. Pilkada serentak adalah Pilkada yang dilaksanakan dalam satu tanggal yang ditentukan. Pilkada serentak merupakan hal yang baru dan pertama bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia. Tujuan utamanya untuk menghemat anggaran dan efektifitas pemilu. Peserta Pilkada serentak adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama 2016. Pelaksanaan Pilkada serentak diikuti oleh 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten.

Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 224 kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Hanya ada dua pasang calon yang maju dalam Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015 lalu. Calon bupati nomor urut 1 adalah Widya Kandi Susanti yang merupakan *incumbent*. Dia sudah menjabat menjadi Bupati Kendal pada masa jabatan 2010 - 2015 berpasangan dengan H. Mukh Mustamiskin sebagai Wakil Bupati. Mereka berhasil memenangkan Pilkada Kendal tahun 2010 dengan perolehan suara sebesar 42%. Selain *incumbent*, Widya Kandi adalah istri dari mantan bupati Kendal yang menjabat 2 periode pada tahun 2000-2007. Pasangannya, Mohamad Hilmi Dimyati Rois adalah sosok dari kalangan santri NU. Ayah dari Mohamad Hilmi termasuk dalam tokoh NU di Kendal yaitu KH Dimyati Rois, lebih tepatnya di Kecamatan Kaliwungu. Bernaung dibawah nama besar ayahnya menjadi poin penting dalam pencalonan dirinya di Pilkada Kendal 2015. Besarnya massa dari kalangan santri NU yang tersebar di Kabupaten Kendal bisa menjadi sumber dukungan bagi pasangan tersebut. Maka dari itu PDIP menggandeng PKB untuk menjadi koalisi partai untuk pencalonan pilbup Kendal ini. Sedangkan calon bupati nomor urut 2 adalah dr. Mirna Annisa, M.Si dan Masrur Marsykur.

Ketika Pemilukada berlangsung, pasangan Mirna-Masrur menang telak dalam Pilkada Kendal 2015. 62,22% masyarakat Kendal mendukung Mirna-Masrur. Angka ini jelas sangat jauh dari perolehan suara pasangan Widya-Hilmi. Hanya 37,78% suara yang mendukung Widya-Hilmi.

Fenomena kekalahan Widya-Hilmi ini menjadi kajian yang menarik, karena mereka didukung oleh parta penguasa yang memiliki basis massa yang kuat di Kendal. Selain itu, mereka juga memiliki dukungan dari basis satri NU melalui jaringan yang dimiliki Hilmi. Modal politik dan jaringan ini seharusnya bisa menjadi pendongkrak suara mereka, namun hasil pemilihan menunjukkan fakta sebaliknya.

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan di balik kegagalan Widya – Hilmi dalam pemilihan bupati Kabupaten Kendal tahun 2015.

C. Teori

C.1 Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum disebut juga dengan “political market”. Political Market adalah pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memilih hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audia (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, patform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilu untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pemilihan kepala daerah mulai digelar setelah pada tahun lalu 2004 Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden. Perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945 nampaknya telah mengantarkan rakyat Indonesia terlibat langsung dalam rekrutmen pejabat negara dan daerah melalui pemilu. UUD 1945 pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota terpilih secara demokratis”. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 56. Dalam pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pemilihan umum (ataupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah) merupakan salah satu parameter apakah sebuah negara telah menjalankan demokrasi dengan sebenarnya, terlebih lagi pemilihan umum tersebut harus dilaksanakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilihan umum diperlukan karena dianggap sebagai langkah pertama untuk membentuk lembaga-lembaga demokrasi..

C.2 Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan poitik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Partai politik yang mengakomodir mulai dari penyeleksian bakal calon kepala daerah

dan wakilnya. Dilakukan seleksi yang sedemikian rupa hingga dapat memunculkan nama calon kepala daerah dan wakilnya, dilanjutkan dengan mendaftarkan pasangan calon. Setelah calon sudah ada, dilaksanakan kampanye untuk mengenalkan dan memasarkan pasangan calon. Kampanye butuh sekali kekuatan partai politik untuk memobilisasi masa dan melaksanakan strategi politik.

C.3 Strategi Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi memiliki arti sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Gray (1999) dalam pendekatan Clausewitz yang mendefinisikan strategi sebagai bentuk *engagements* tujuan perang. Sehingga, penjelasan definisi strategi selalu mengarah pada hubungan antara kekuatan militer dan tujuan politik.

D. Metode Penelitian

D.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengkaji deskripsi-desripsi dalam hal Analisis Kegagalan Pasangan Widya Kandi dan Moh Hilmi Dalam Pemilu Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2015.

D.2 Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara yang kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam. Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

D.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden sesuai dengan garis besar pokok pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan diberikan kebebasan untuk memberi jawaban atas pertanyaan.

2. Dokumen

Dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D.4 Analisis Interpretasi Data

Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data:

1. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder.
 2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
 3. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif.
-

E. PEMBAHASAN

E.1 Partai Pengusung

Partai politik dalam pemilu memiliki peranan yang sangat penting. Sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 bahwa calon kepala daerah baik walikota, bupati, dan gubernur harus melalui jalur perseorangan atau partai politik. Dalam perkembangannya, PDIP memutuskan untuk berkoalisi dengan PKB dan Nasdem mengusung Widya Kandi dan Moh Hilmi. Jumlah kursi masing-masing partai adalah 9 kursi untuk PDIP, 6 kursi untuk PKB, 1 kursi untuk Nasdem. Jadi total keseluruhan kursi dari partai yang mengusung Widya Kandi dan Moh Hilmi adalah 16 kursi.

Ternyata peran partai tidak begitu banyak terlibat dalam proses pemenangan. Fungsi partai politik dapat dikatakan hanyalah kendaraan bagi pasangan calon untuk maju dalam Pilkada. Seperti hanya untuk melengkapi syarat saja. Efektifnya harus dari dua sisi, dari pasangan calon dan dari partai politik juga. Rata-rata pasangan calon yang bergerak karena salah satu faktanya adalah dana. Dana politik untuk kemenangan banyak dikeluarkan oleh pasangan calon. Partai sangatlah kecil perannya dalam masalah pendanaan ini. Efektifnya harus dari dua sisi, dari pasangan calon dan dari partai politik juga.

E.2 Figur

E.2.1 Figur Widya Kanti Susanti

Widya Kandi Susanti adalah bupati *incumbent* atau petahana yang artinya adalah bupati yang sedang menjabat diperiode pertama, maju lagi dalam pemilihan berikutnya untuk meneruskan masa jabatannya yang ke 2. Dalam masa jabatan Widya Kandi periode pertama, pembangunan di Kabupaten Kendal terasa sangat lambat. Terutama disektor infrastruktur, jalan di Kabupaten Kendal banyak yang rusak.

Widya Kandi selaku bupati menjabat tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Permasalahan pembangunan infrastruktur pada periode pertama Widya Kandi menjadi Bupati Kabupaten Kendal berdampak signifikan terhadap kekalahan Pemilukada tahun 2015. Kepercayaan masyarakat terhadap sosok Widya Kandi yang pernah memimpin Kendal menjadi menurun. Widya Kandi pada periode pertamanya pasti memiliki target untuk sektor pembangunan daerah. Permasalahan yang terjadi adalah target infrastruktur selesai tahun 2014 tidak terealisasi. Masyarakat tidak merasa daerahnya dibangun, terutama bagian jalan. Sudah dapat dipastikan masyarakat menjadi kecewa dan tidak diperhatikan oleh Bupati. Hal ini membuat menurunnya elektabilitas dari sosok Widya Kandi sendiri.

Selain dari sisi kinerja Widya Kandi sebagai Bupati diperiode pertama kurang memuaskan bagi masyarakat, ada hal lain yang termasuk dalam kategori menjatuhkan nama Widya Kandi. Menjelang dilaksanakannya pemilu bupati Kabupaten Kendal banyak tersebar isu-isu miring tentang Widya Kandi. Praktek penyebaran isu-isu yang menjatuhkan nama Widya Kandi termasuk dalam black campaign atau kampanye hitam. Status Widya Kandi sebagai janda menjadi senjata untuk menyebarkan kampanye hitam. Sebagai kesimpulan, kampanye hitam yang dilaksanakan oleh pihak luar telah efektif mempengaruhi masyarakat Kabupaten Kendal untuk tidak memilih Widya Kandi. Hingga pasangan Widya Kandi dan Moh Hilmi kalah dalam Pilkada Kabupaten Kendal 2015

E.2.2 Figur Mohammad Hilmi

Moh Hilmi adalah sosok yang diusung oleh PKB untuk mendampingi Widya Kandi maju dikontestasi pemilukada Kabupaten Kendal. PKB ini posisinya pada pemilukada Kabupaten Kendal tahun 2015 adalah sebagai partai koalisi dari PDIP. Sesuai dengan ideologinya PKB adalah partai yang berbasis keagamaan. Harapannya partai yang didirikan oleh para ulama ini dapat membuktikan relasi antara PKB dengan para ulama masih berjalan dengan baik dan dapat mengikat masyarakat. Orang tua dari Moh Hilmi, KH Dimiyati Rois, adalah tokoh ulama yang kharismatik dan sangat dekat dengan masyarakat. Sehingga harapannya Moh Hilmi dapat mewakili dari representasi pesantren yang bisa membangun Kabupaten Kendal.

Moh Hilmi ini adalah sosok yang benar-benar awam dalam dunia politik. Bahkan sebelum Pilkada Kabupaten Kendal 2015 Moh Hilmi belum pernah sama sekali terlibat dalam politik. Faktor paling kuat dari sosok Moh Hilmi hanyalah latar belakang keluarganya saja. Tetapi dari pribadinya Moh Hilmi sendiri dia benar-benar orang baru dipolitik. Juga sebagai representasi dari lingkungan santri dan pesantren. Masyarakat akan hanya melihat latar belakangnya saja, tidak dengan melihat sosoknya. Harapannya ketika dipasangkan dengan Widya Kandi dari PDIP dan Moh Hilmi dari PKB akan menjadi koalisi yang cukup kuat, nasionalis religius. Mengingat suara PKB dalam Pemilu Legislatif 2014 ada di urutan ketiga.

E.3 Strategi Politik

Tim sukses adalah tim yang dibentuk untuk memenangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam Pilkada. Anggota dari tim sukses itu sendiri diambil dari anggota partai-partai pengusung. Tidak hanya dari salah satu partai saja tapi seluruh partai yang berkoalisi mendukung pasangan calon. Tim sukses diambil dari struktural partai tingkat DPC. Baik dari PDI, Nasdem, PKB, PPP, Demokrat, dan Perindo.

Harapannya dengan adanya tim sukses yang terdiri dari berbagai partai itu dapat mempermudah kemenangan dalam pemilu. Partai yang sudah berkoalisi dengan PDIP pasti menjadi bagian dari tim sukses. Memang tujuan utama dari koalisi, sudah pasti terlibat dalam tim sukses, adalah memperingankan dan bersatu bahu-membahu untuk bersama-sama mencapai kemenangan.

Pada kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Kekurang efektifan dalam tim sukses dapat berdampak buruk bagi hasil akhir. Salah satu yang menjadi poin kurang efektifnya tim sukses ini adalah dari semua koalisi yang terbangun tidak ada penambahan suara jika dibandingkan dengan pemilu legislatif sebelumnya.

Strategi politik yang digunakan adalah metode konsolidasi sebagai senjata utama. Terutama hanya dilaksanakan kepada kader masing-masing partai dan tokoh-tokoh masyarakat. Disini terjadi kelemahan yaitu kurangnya pasangan calon terjun ke masyarakat secara langsung. Kurangnya kampanye terbuka menjadi pengaruh dalam sosialisasi langsung terhadap masyarakat. Membuat masyarakat tidak mengenal langsung para pasangan calon.

Selain kampanye yang berifat tertutup, ada kekurangan lain yang termasuk menjadi faktor kekalahan, yaitu hanya menjual program yang sudah dilaksanakan dan menjanjikan meneruskan program yang belum terealisasi. Padahal tanpa harus menjual program yang telah terlaksana, masyarakat sudah bisa merasakan sendiri apa yang telah dikerjakan oleh Petahana/incumbet dalam periode pertamanya. Kurangnya informasi terhadap program-program yang diajukan dalam kampanye membuat masyarakat merasa pesimis akan adanya perubahan Kabupaten Kendal menjadi lebih baik

E.4 Politik Uang

Politik uang dewasa ini sebenarnya sudah menjadi hal yang bisa dipraktikkan dalam rangka memenangkan calon pada pemilu. Malah banyak yang mengatakan karena politik uang ini menjadi praktik yang biasa ketika ajang pemilu, mempengaruhi dalam perilaku memilih masyarakat. Masyarakat tidak lagi memilih siapa kandidat terbaik tapi malah menjadi siapa kandidat yang bayar paling besar. Cuma hal seperti ini sangat sulit sekali mendapatkan buktinya. Makanya tidak banyak yang terjerat kasus politik uang ini. Ada beberapa bupati/walikota yang terkena kasus di Indonesia. Cukup berat memang sangsinya karena dapat membatalkan jabatan sebagai bupati/walikota.

Pada pemilu Kabupaten Kendal 2015 kemarin secara hukum tidak ada yang terjerat kasus politik uang ini. Tetapi pada prakteknya tetap ada money politik tetapi tidak masif. Mungkin hanya beberapa daerah saja di Kabupaten Kendal yang kena praktik politik uang dan nominalnya pun juga kecil. Sisi baiknya adalah kesadaran masyarakat Kabupaten Kendal untuk melawan politik uang sudah tinggi. Jadi praktik politik uang sudah bukan menjadi alat utama untuk kemenangan.

Praktik politik uang ini memang masih sulit sekali untuk diberantas apa lagi dengan sistem pemilihan langsung seperti sekarang. Secara praktik lapangan dua narasumber berkata praktik politik uang tetap ada tetapi sangat kecil sekali politik uang itu dilakukan. Secara hukum sendiri memang tidak ada kasus tentang politik uang itu sendiri. Dapat diartikan bahwa secara hukum tidak terbukti adanya praktik politik uang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyajikan kesimpulan ke dalam point-point yang relevan, antara lain:

1. Peran partai politik dalam memenangkan pasangan Widya Kandi dan Moh Hilmi kurang efektif. Partai politik secara kelembagaan telah melakukan perannya dengan cukup baik. Melakukan seleksi terhadap calon dan membangun koalisi dengan partai lain. Tetapi kurang perannya dalam membantu calon untuk memenangkan pemilu.
 2. Secara figur masyarakat sudah kecewa terhadap Widya Kandi. Pada saat beliau menjabat menjadi bupati kinerja kurang baik. Terutama masalah jalan yang rusak di Kabupaten Kendal tidak kunjung diperbaiki. Selain itu ada masalah isu kampanye hitam yang menyerang status Widya Kandi yang janda. Moh Hilmi sebagai wakilnya adalah sosok yang sangat baru sekali. Masyarakat kurang mengenal sosok beliau dan belum ada pengalaman politik sama sekali.
 3. Dalam strateginya secara keseluruhan sudah cukup baik. Kinerja tim sukses kurang maksimal karena hasil yang didapat tidak ada penambahan suara dari partai pengusung yang lain. Hanya mengandalkan konsolidasi untuk mempromosikan pasangan calon. Tidak menggunakan kampanye terbuka yang berdampak masyarakat kekurangan informasi tentang pasangan calon. Tidak menjual program baru hanya mengandalkan program yang telah berjalan dan melanjutkan yang belum terealisasi.
 4. Politik uang dalam praktiknya sudah cukup baik, masyarakat sebagian besar sudah berani menolak praktik ini. walaupun masih dilakukan, tetapi hanya dalam skala kecil.
-

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang didapat, maka penulis berusaha untuk memberikan saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memenangkan pemilu.

1. Perkuat kembali peran partai politik sebagai pencetak kader-kader pejabat publik. Serta dalam proses pemenangan calon selalu mengawal sehingga prosesnya dapat diawasi dengan baik.
2. Untuk bupati dan wakil bupati yang menjabat berikutnya sebaiknya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga membangun infrastruktur Kabupaten Kendal dengan waktu yang singkat dan kualitas yang terbaik.
3. Tim sukses sebaiknya lebih waspada dan lebih mempersiapkan strategi sematangmatangnya. Jangan terlena bahwa petahana pasti memiliki suara yang kuat.
4. Praktik politik uang lebih baik tidak dilakukan. untuk mendidik masyarakat menjadi pemilih yang objektif. Tidak tergantung dengan siapa yang memberi dengan nominal terbesar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, 2008. *Mengelola Parpol: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- H.I, A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, Ni'matul. S.H., M.Hum. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Ed. Ke-1*, Jakarta: Kencana.
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Malang: Averroes Press.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (dalam rancangan penelitian)*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Schroder, Peter, 2003. *Strategi Politik*, Jakarta: PT. Mita Alembana Grafika.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Zetter, Lionel, 2008. *Strategi Memenangkan Pilkada, Pemilu & Pilpres*, Jakarta: PT. Ina Publikatama
-

Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Perubahan kedua UUD 1945

Sumber Lain

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206612049/bab2.pdf> diunduh pada hari Rabu 20 April 2016 pukul. 16.48

<http://politikagraria.blogspot.co.id/2014/03/mengupas-tipe-parpol.html> diunduh pada hari Kamis 18 Agustus 2016 pukul 22.33

Huwae, Christian. Jurnal: *Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi Di Kota Bitung)*.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1449/1149>

Diunduh pada hari rabu 20 April 2016 pukul 17.01

.
